



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEBUMEN, 31 DESEMBER 2022**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN,
31 DESEMBER 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan laporan ini telah diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Untuk itu kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan, pengkajian dan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Demikin Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 disampaikan, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Kebumen, 31 Desember 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN**

Drs. ASEP NURDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 1993111 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1. Gambaran Umum Organisasi	10
1.2. Permasalahan Utama yang dihadapi.....	13
1.2.1 Urusan Lingkungan Hidup.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Perencanaan Strategis	25
2.1.1 Rencana Strategis	25
2.1.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.1.1 Sasaran 1, “ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”	31
Indikator sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU Daerah).	31
Indikator : Capaian luas RTH perkotaan.	36
Indikator : Angka indeks kualitas udara.	39
Indikator : Angka indeks kualitas air.....	41
Indikator : Cakupan pelayanan sampah.	45
3.1.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan”	48
Indikator sasaran : Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	48
Indikator : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.....	50

Indikator : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	55
Indikator : Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam.	59
3.2. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	66
4.2. Permasalahan/kendala.....	67
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja.	68
LAMPIRAN 1 : REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021	71
LAMPIRAN 2 : DATA PRESTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022	77
LAMPIRAN 3 : PERJANJIAN KINERJA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022.....	26
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 3. 1 Skala Ordinal dan Kategori Capaian	30
Tabel 3. 2 IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2022	32
Tabel 3. 3 Capaian IKLH Tahun 2022 dengan tiga variabel.....	32
Tabel 3. 4 Capaian luas RTH perkotaan tahun 2022	37
Tabel 3. 5 Data luas RTH Perkotaan sampai dengan tahun 2022	38
Tabel 3. 6 Indeks Kualitas Udara tahun 2022.....	40
Tabel 3. 7 Capaian indeks kualitas air tahun 2022.....	43
Tabel 3. 8 Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2022	45
Tabel 3. 9 Perhitungan cakupan pelayanan sampah tahun 2022.....	46
Tabel 3. 10 Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	48
Tabel 3. 11 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 - 2022.....	49
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap akhir target Renstra.	50
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Pada Akhir Target Renstra.	51
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Terhadap Akhir target Renstra	55
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan dan Garam terhadap akhir target Renstra.	59
Tabel 3. 16 Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2022.....	64
Tabel 4. 1 Capaian Indikator Kinerja tahun 2022	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1	Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022	33
Grafik 3. 2	Perbandingan capaian IKLH dengan provinsi dan nasional.....	33
Grafik 3. 3	Capaian luas RTH perkotaan Kabupaten Kebumen tahun 2018-2022.....	37
Grafik 3. 4	Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen s/d Tahun 2022.....	40
Grafik 3. 5	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional.....	41
Grafik 3. 6	Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022.....	43
Grafik 3. 7	Capaian IKA Kabupaten Kebumen dibandingkan Provinsi dan Nasional	44
Grafik 3. 8	Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2018-2022.....	45
Grafik 3. 9	Target dan Realisasi Kinerja urusan Kelautan Perikanan Tahun 2022.....	48
Grafik 3. 10	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan tahun 2018 – 2022.	49
Grafik 3. 11	Target dan Realisasi produksi perikanan Budidaya tahun 2018 – 2022	51
Grafik 3. 12	Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Budidaya tahun 2018 – 2022	52
Grafik 3. 13	Capaian Kinerja Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022.....	53
Grafik 3. 14	Target dan Realisasi produksi perikanan Tangkap tahun 2018 – 2022.....	55
Grafik 3. 15	Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Tangkap tahun 2018 – 2022	56
Grafik 3. 16	Capaian Kinerja Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2022	57
Grafik 3. 17	Target dan Realisasi produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Ton) tahun 2018 – 2022.....	60

Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Nilai Produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Rp) tahun 2018 – 2022.....	61
Grafik 3. 19 Capaian kinerja jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dan garam tahun 2018 -2022.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Topografi Kabupaten Kebumen	14
--	----

BAB I

PENDAHULAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen secara umum dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Subkoordinator Pengelolaan Persampahan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Subkoordinator Pelestarian Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pembudidayaan Ikan;
 - 2. Subkoordinator Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan; dan
 - 3. Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya

- f. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - 2. Subkoordinator Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan di Perairan Umum Daratan; dan
 - 3. Subkoordinator Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Permasalahan Utama yang dihadapi

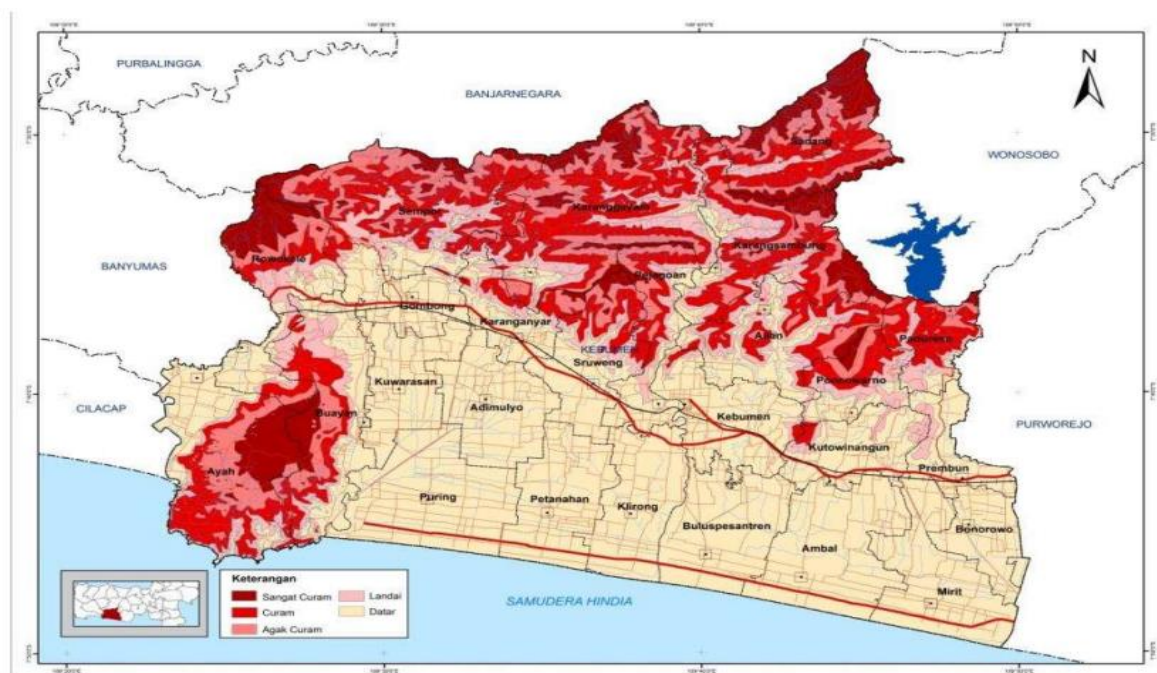
1.2.1 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama atau isu-isu strategis yang terjadi pada urusan lingkungan hidup adalah;

- 1.2.1.1 Masih kurangnya kajian tentang keanekaragaman hayati.
- 1.2.1.2 Belum optimalnya daya angkut sampah dan penanganan yang tidak terpusat di satu instansi saja sehingga data tidak terpusat.
- 1.2.1.3 Perlu peningkatan koordinasi antara Instansi, stakeholder terkait dengan konservasi penanaman bibit penyangga abrasi di pesisir pantai selatan, sehingga masih banyak penebangan tanaman konservasi untuk kegiatan usaha.
- 1.2.1.4 Perlunya koordinasi, rehabilitasi dan pengetatan sekitar aliran sungai untuk mencegah erosi akibat lekukan sungai, penebangan pohon atau aktifitas penambangan disekitar Daerah Aliran Sungai.
- 1.2.1.5 Capaian luas RTH perkotaan belum optimal perlu penyesuaian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten dan provinsi serta belum terpenuhinya ketersediaan 30% Ruang Terbuka Hijau terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengawasan penyediaan RTH minimal untuk para pengembang perumahan atau kegiatan usaha.
- 1.2.1.6 Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah domestik, limbah rumah tangga maupun limbah industri berbahaya.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2021 adalah sebanyak 1,405,644 jiwa. Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Kabupaten Kebumen terletak di provinsi Jawa Tengah yang meliputi pegunungan dibagian utara dan sebagian sebelah barat serta dataran rendah di bagian selatan. Adapun Batas Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Wonosobo, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Berikut adalah peta Kabupaten Kebumen yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, Peta Revisi RTRW, 2019

Gambar 1. 1 Peta Topografi Kabupaten Kebumen

Adapun isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan potensi bencana yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Angin Ribut

Wilayah yang rentan bencana Angin Ribut adalah ;

Sebagian Kecamatan Ambal, Kebumen, Kutowinangun, Bulus Pesantren, Petanahan, Adimulyo, Pejagoan dan sebagian kecil kecamatan Gombong.

2. Rawan Banjir

Wilayah yang rentan bencana Banjir adalah ; Sebagian Kecamatan Gombong, Ayah, Karang Anyar, Puring, Kuwarasan, Buayan, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Kebumen, Bulus Pesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.

3. Rawan Gempa

Wilayah yang rentan bencana Gempa adalah ; Sebagian Kecamatan Karangsembung, Alian, Sadang, Karanggayam, Sempor dan Rowokele.

4. Rawan Kekeringan

Wilayah yang rentan bencana Kekeringan adalah ; Sebagian Kecamatan Padurso, Poncowarno, Alian, Pejagoan dan Karanggayam.

5. Rawan Tsunami

Wilayah yang rentan bencana Tsunami adalah ; Sebagian Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring dan Ayah.

6. Rawan Tanah Longsor

Wilayah yang rentan bencana Longsor adalah ; Sebagian Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsembung, Sadang, Padureso dan Poncowarno.

Yang mana apabila hal tersebut diatas tidak ditangani dan segera dilakukan pencegahan, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang serius di Kabupaten Kebumen.

Kemudian Isu-isu penting mengenai Indikator kinerja di bidang Lingkungan Hidup yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh berbagai faktor;

- Prosentase Cakupan pelayanan sampah sangat dipengaruhi oleh banyaknya sampah yang terangkut.

Maka diperlukan pengoptimalan Armada (truck sampah dan armroll), Penambahan TPS dan Armada baru di wilayah diluar perkotaan, meningkatkan retribusi pelayanan sampah dengan menambah jumlah pelanggan, Daya tampung TPA dan kegiatan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan kembali dan Peningkatan kesejahteraan pekerja.

- Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau peningkatan Keanekaragaman Hayati sangat dipengaruhi oleh banyaknya lahan yang bisa dikelola oleh pihak Kabupaten untuk pengelolaan serta pengoptimalan Keanekaragaman Hayati.
- Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengajak partisipasi masyarakat dalam menjaga Lingkungan Hidup. Maka diperlukan peningkatan jumlah personel dalam kegiatan penghargaan lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat yang peduli lingkungan untuk studi banding ke berbagai tempat/ instansi terkait serta mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah. Selain itu pendekatan untuk mencapai keberhasilan kegiatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan dilakukan dengan kemasan yang menarik bagi partisipan.
- Kegiatan pengawasan dan perijinan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh jumlah usaha yang diawasi dan kesadaran masyarakat tentang administrasi lingkungan hidup yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha. Maka diperlukan wadah khusus pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan melalui smart city atau pelaporan bersifat online dan sosialisasi perijinan lingkungan hidup dengan pengoptimalan sosialisasi melalui reklame, poster, website, atau menyantulkannya di aplikasi perijinan.

- Pengendalian pencemaran lingkungan merupakan Program yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah terdiri dari Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran. Kegiatan *Pencegahan Pencemaran* sangat diperlukan kesadaran masyarakat maka diperlukan sosialisasi bahaya pencemaran dan fasilitasi pengaduan sedini mungkin terhadap pencemaran yang ada. Kegiatan *Pengendalian Pencemaran* sangat dipengaruhi oleh keakuratan data yang dihasilkan dalam menguji Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Vegetasi Tutupan Lahan (data provinsi) maka diperlukan pendataan berulang dan pelaporan secara online agar dapat memberikan penanganan yang tepat sasaran dari Instansi terkait. Kegiatan *Pemulihan Pencemaran* meliputi Restorasi, Rehabilitasi serta Penghentian Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup. Restorasi dapat dilakukan dengan mengembalikan luasan fungsi lahan yang sudah terkena alih fungsi lahan atau dengan meminimalkan resiko terjadinya bencana di daerah tersebut. Kegiatan Rehabilitasi dapat dilakukan terhadap lahan yang kritis. Serta Penghentian Sumber Pencemaran dapat dilakukan rutin setiap tahun terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Kegiatan Penanganan Limbah B3 sangat dipengaruhi oleh penanganan serta pengelolaan terhadap Limbah B3 kabupaten/kota. Maka diperlukan peningkatan pengawasan dan pelayanan penyimpanan sementara terhadap Limbah Berbahaya yang berpotensi mencemari Lingkungan.

1.2.2 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan yang dihadapi dan hampir menjadi permasalahan setiap tahun antara lain adalah sebagai berikut :

- 1.2.2.1 Belum tercukupinya kebutuhan benih di seluruh kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Kebumen; hal ini dilihat dari masih banyaknya bibit ikan yang masuk ke Kabupaten Kebumen, antara lain bibit ikan lele dari Banjarnegara dan bibit ikan gurami dari Purworejo yang dikarenakan kurang optimalnya operasional baik Balai Benih Ikan (BBI) karena masih dalam tahap renovasi maupun Unit Perbenihan Rakyat (UPR) yang ada di Kabupaten Kebumen.
- 1.2.2.2 Kurangnya UPR yang bersertifikat sehingga belum menjamin mutu benih ikan yang dihasilkan.
- 1.2.2.3 Jumlah produksi perikanan, khususnya perikanan tangkap di laut (yang dilakukan oleh para nelayan), sangat tergantung sekali dari faktor alam/musim, siklus 5-6 tahunan, penurunan produksi ikan yang di darat, namun demikian tahun ini jumlah produksi mencapai target tetapi target PAD tidak tercapai. Hal ini dikarenakan ikan hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi yang rendah, sehingga target PAD tidak tercapai.
- 1.2.2.4 Kapasitas kapal (GT) masih kecil sehingga nelayan hanya bisa melakukan operasional secara one day fishing yang berada dijalur satu sehingga hasilnya kurang maksimal.
- 1.2.2.5 Para pembudidaya kebanyakan juga masih menggunakan sistem tradisional karena terbatasnya modal usaha.
- 1.2.2.6 Masih rendahnya angka konsumsi makan ikan tingkat kabupaten jika dibandingkan dengan provinsi yang sudah mencapai angka 33,14 kg/ka/th apalagi tingkat nasional yang sudah mencapai angka 50,43 kg/ka/th.
- 1.2.2.7 Masih sedikitnya jumlah kelompok masyarakat pengawas yang ada, dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas) walaupun ada potensi di daerah tersebut.

1.3 Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen tahun 2023;

1.4 Sistematika Penyajian LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- COVER
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR GRAFIK
- DAFTAR DIAGRAM

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
 - 1.2. Fungsi Strategis Organisasi
 - 1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi
 - 1.4. Landasan Hukum
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA
- 2.1. Perencanaan Strategis
 1. Rencana Strategis (Renstra)
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 - 2.2. Perjanjian Kinerja
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2. Realisasi Anggaran
- BAB IV : PENUTUP
- 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
 - 4.2. Permasalah/Kendala
 - 4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi/Pusat
4. Lain – lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Terpilih yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

2.1.2 Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan mengacu pada *Misi ke-3 dan ke-4*. Untuk urusan Kelautan dan Perikanan mengacu pada misi ke-3 yaitu “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Sedangkan untuk urusan Lingkungan Hidup secara umum mengacu pada *Misi ke-4* yaitu ”Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Meliputi :

- a. Urusan Lingkungan Hidup :
 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU Daerah)
 2. Indeks Kualitas Udara
 3. Indeks Kualitas Air
 4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
 5. Capaian RTH Perkotaan
 6. Cakupan Pelayanan Sampah

b. Urusan Kelautan dan Perikanan :

1. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan (IKU Urusan)
2. Produksi Perikanan Budidaya
3. Produksi Perikanan tangkap
4. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam Kabupaten Kebumen

2.1.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target indikator kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Target Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022

1. Urusan Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,10
			Capaian luas RTH perkotaan	17,19%
			Angka Indeks Kualitas Udara	91,50
			Angka Indeks Kualitas Air	63,10
			Angka Indeks Kualitas Lahan	60,83
			Cakupan pelayanan sampah	65,00%

2. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer	Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan	3,00%
			Produksi perikanan budidaya	3.231,98 ton
			Produksi perikanan tangkap	9.136,73 ton
			Produksi garam kebumen	151.851 ton
			Produksi pengolahan hasil perikanan	

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,10	74,10
		Capaian luas RTH perkotaan	17,19	17,19
		Angka Indeks Kualitas Udara	91,50	91,50
		Angka Indeks Kualitas Air	63,10	63,10
		Angka Indeks Kualitas Lahan	60,83	60,83
		Cakupan pelayanan sampah	65,00	65,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
1.	Meningkatkan nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan	3,00	3,00
		Produksi perikanan budidaya	3.231,98 ton	3.231,98 ton
		Produksi perikanan tangkap	9.136,73 ton	9.136,73 ton
		Produksi pengolahan hasil perikanan dan garam kebumen	151.851 ton	151.851 ton

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	341.000.000	341.000.000	APBD Kab
2	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	1.975.259.000	2.553.485.000	APBD Kab
3	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	2.794.490.000	3.720.050.000	APBD Kab
4	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)	110.000.000	110.000.000	APBD Kab
5	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/PPLH	187.100.000	179.210.000	APBD Kab
6	Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	199.940.000	199.940.000	APBD Kab
7	Program	113.850.000	113.850.000	APBD Kab

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	penghargaan lingkungan hidup			
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	53.819.000	53.819.000	APBD Kab
9	Program Pengelolaan Sampah	8.162.716.00	9.079.790.000	APBD Kab
10	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	13.325.001.000	13.157.200.000	APBD Kab
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.315.490.000	4.970.030.000	APBD Kab
12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.276.750.000	4.642.267.000	APBD Kab
13	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan	50.000.000	50.000.000	APBD Kab
14	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	646.000.000	395.221.00	APBD Kab
	Jumlah Anggaran	36.971.751.000	39.565.862.000	APBD Kab

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala Pengukuran Ordinal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Skala Ordinal dan Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori
1	>100%	Baik Sekali (BS)
2	75% - 100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	< 55%	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022, mencakup dua sasaran strategis yaitu :

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- (2) Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan

Secara rinci capaian kinerja tahun 2022 untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran 1, “ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”
Indikator sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU Daerah).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai informasi awal dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Sebagai instrument indicator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan standar perhitungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra 2021-2026 mencakup tiga variable yaitu angka Indeks Kualitas Udara dan angka Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (data dari Kehutanan Provinsi).

Formulasi perhitungan capaian kinerja IKLH sebagai berikut :

$$(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$$

Adapun capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2 IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
IKLH	64,43	74,10	68,17	91,99 %	74,45	91,56

Perhitungan IKLH tahun 2022 menggunakan tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Air realisasi sebesar 54,49, Indeks Kualitas Udara sebesar 90,94 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 49,53 (Data Kehutanan Provinsi).

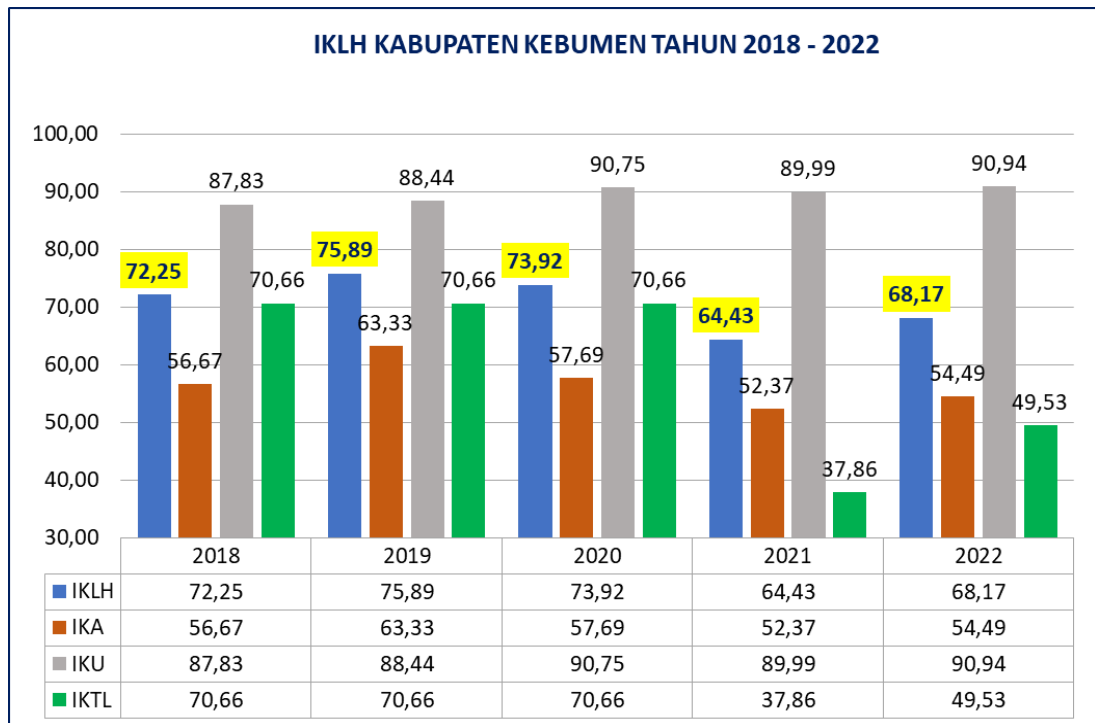
Tabel 3. 3 Capaian IKLH Tahun 2022 dengan tiga variabel

VARIABEL	INDEKS	x	HASIL
Indeks Kuaslitas Air	54,49	0,376	20,49
Indeks Kualitas Udara	90,94	0,405	36,83
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,53	0,219	10,85
IKLH			68,17

Adapun Predikat IKLH adalah sebagai berikut :

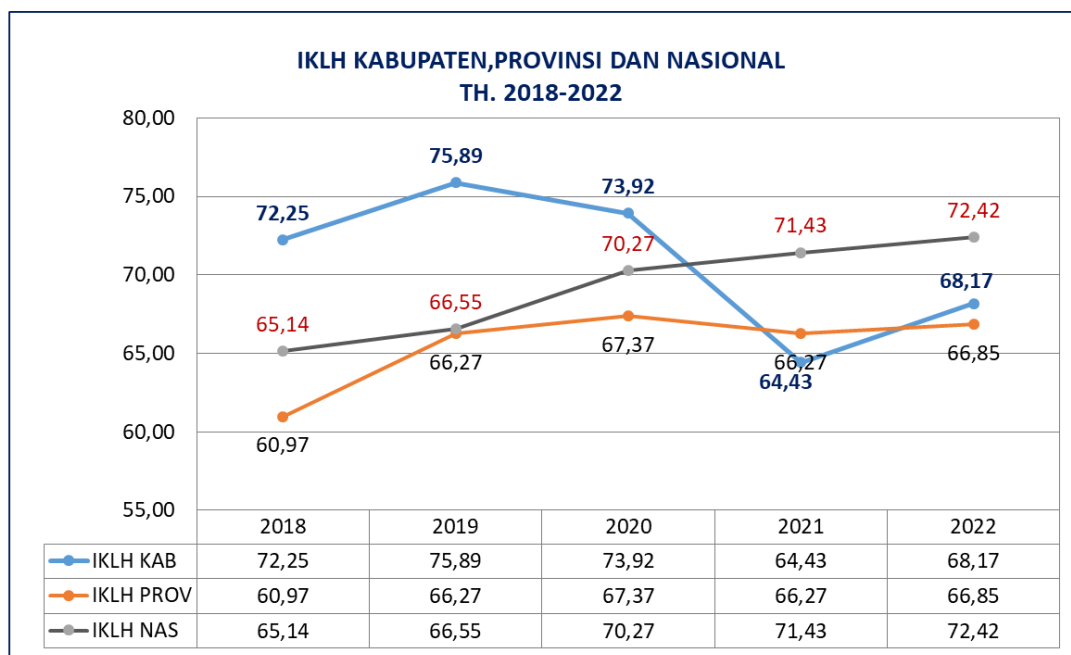
- < 40 = waspada
- 40 - 50 = sangat kurang
- 50 - 60 = kurang baik
- 60 – 70 = cukup baik
- 70 – 80 = baik
- > 80 = sangat baik

Hasil capaian IKLH selama 5 tahun terakhir kami sajikan pada grafik di bawah ini:



Grafik 3. 1 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

Sedangkan Perbandingan capaian kinerja dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3. 2 Perbandingan capaian IKLH dengan provinsi dan nasional

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Capaian IKLH Kabupaten Kebumen selalu di atas/lebih besar dari pada capaian

IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan Pada tahun 2021, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Provinsi maupun Nasional karena faktor IKTL yang menurun drastis. Namun demikian hasil perolehan IKLH Kabupen Kebumen tahun 2021 sebesar **64,43** atau masuk kategori **“CUKUP BAIK/SEDANG”**.

Tahun 2022 capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Nasional (72,42) namun masih diatas capaian IKLH Provinsi (66,85), yaitu sebesar **68,17** dan masih termasuk kategori **“CUKUP BAIK/SEDANG”**. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan metode laporan IKLH mulai tahun 2021 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi online dari kementerian LHK. Dari hasil penilaian melalui aplikasi online tersebut terdapat penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang disebabkan karena adanya kendala dari input data dengan aplikasi. Beberapa kendala tersebut, antara lain adanya batasan waktu input serta verifikasi data yang dilakukan oleh provinsi dan pusat. Penurunan nilai IKA cukup signifikan karena dari hasil input data yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dari total 118 data hanya 76 data yang terverifikasi yang berasal dari data waduk/embung karena kurangnya parameter pokok IKA.

Penurunan nilai IKL dipengaruhi oleh input data Kabupaten yang sebagian besar tidak terverifikasi karena kurangnya peta dan koordinat lokasi lahan

Upaya/peran nyata Kabupaten Kebumen dalam mencapai target pada tahun 2022 antara lain melalui kegiatan :

- sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap masyarakat, perihal pengendalian pencemaran lingkungan serta program konservasi sumberdaya alam. Hal ini sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik

- adanya demplot/percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan “model” pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran
- upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH
- Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target IKLH antara lain :
 - adanya penambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup
 - perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan
 - keterbatasan anggaran (adanya rasionalisasi anggaran)

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah :

- sosialisasi secara terus menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen
- penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah
- melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip” dan pelaksanaan program unggulan Bupati Kebumen “Nandur Wit Nggo Anak Putu”
- mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan
- melaksanakan penegakan hukum lingkungan

Upaya yang dilakukan pada tahun 2022 sebagai berikut :

- sosialisasi secara terus-menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen
- penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah
- melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip” dan pelaksanaan program unggulan Bupati Kebumen “Nandur Wit Nggo Anak Putu”
- mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan
- melaksanakan penegakan hukum lingkungan

Pada tahun 2022 indikator ini didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.553.485.000,- dan realisasi Rp.2.511.319.512,-(98,35%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,65 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

Indikator : Capaian luas RTH perkotaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan luas RTH minimal yang harus disediakan oleh suatu kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Private.

Formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut :

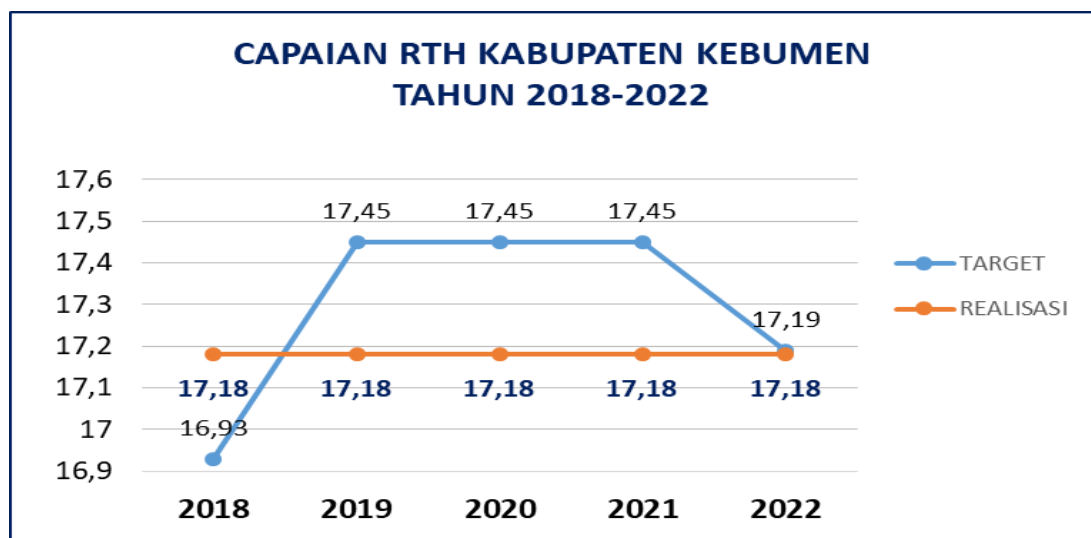
$$\frac{\text{Luas RTH perkotaan}}{\text{Luas kebutuhan RTH perkotaan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Luas RTH Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 4 Capaian luas RTH perkotaan tahun 2022

No.	Indikator kinerja	capaian sd 2021	2022			Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Capaian luas RTH Perkotaan	17,18	17,19	17,18	99,94	17,45

Sedangkan capaian luas RTH perkotaan lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut : (di grafik kurang data tahun 2022)



Grafik 3. 3 Capaian luas RTH perkotaan Kabupaten Kebumen tahun 2018-2022

Data existing RTH perkotaan Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5 Data luas RTH Perkotaan sampai dengan tahun 2022

NO	WILAYAH	LUAS KAWASAN PERKOTAAN / HPL (Ha)	RTH EKSISTING	LUAS (Ha)	CAPAIAN (%)
1	Gombong	1.785,81	Lapangan	3,13	
			Makam	19,57	
			Sempadan KA	21,42	
			Sempadan Sungai	180,77	
			224,89	12,59	
2	Karanganyar	483,32	Lapangan	3,08	
			Makam	9,12	
			Sempadan KA	7,17	
			Sempadan Sungai	61,40	
			80,77	16,71	
3	Kebumen	1.234,38	Alun-Alun	3,93	
			Batas Kota	0,41	
			Hutan Kota	3,32	
			Lapangan Islam Center	0,17	
			Makam	46,43	
			Median Jalan	1,40	
			Pasar Hewan	0,10	
			Pulau Jalan	0,14	
			Sempadan KA	18,21	
			Sempadan Saluran-Induk	14,70	
			Sempadan Sungai	179,56	
			Stadion	3,77	
			Taman	5,57	
			Taman Jalan	2,35	
			Taman Parkir	1,29	
281,35	22,79				
4	Kutowinangun	455,33	Lapangan	3,56	
			Makam	15,89	
			Sempadan KA	3,54	
			Sempadan Sungai	77,68	
			100,67	22,11	
5	Prembun	300,78	Lapangan	0,48	
			Makam	9,10	
			Taman	0,82	
			Sempadan KA	2,54	
			Sempadan Sungai	31,37	
44,31	14,73				
TOTAL		4.259,62		731,99	17,18

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain terkait dengan kesulitan penambahan lahan RTH di wilayah perkotaan maupun kebutuhan anggaran yang relatif besar. Pada tahun anggaran 2022 terdapat anggaran untuk pembangunan RTH, antara lain pembangunan taman di depan Disdukcapil, Taman Polres Kebumen, serta TPU Ambal. Tetapi pembangunan taman-taman tersebut bersifat pemeliharaan dan belum menambah luasan RTH serta belum dapat mencukupi pencapaian RTH Publik 20% yang diperlukan dalam memenuhi target, yaitu RTH seluas 852 Ha dari total luas wilayah perkotaan 4.260 Ha, sedangkan RTH yang ada saat ini sudah mencapai 732 Ha yang berarti masih kurang sekitar 120 Ha.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD, diupayakan dengan merencanakan penambahan luasan RTH, di samping tetap melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung indikator ini yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan total anggaran sebesar Rp. 3.720.050.000,- dan realisasi Rp. 3.525.858.300,- (94,78%), dengan penghematan belanja sebesar 5,22%.

Indikator : Angka indeks kualitas udara.

Angka Indeks Kualitas Udara dipergunakan untuk menjelaskan/ menginformasikan perubahan-perubahan kualitas udara suatu perkotaan. Formulasi penghitungan indeks kualitas udara berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO₂ dan NO₂, dengan formulasi sebagai berikut :

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

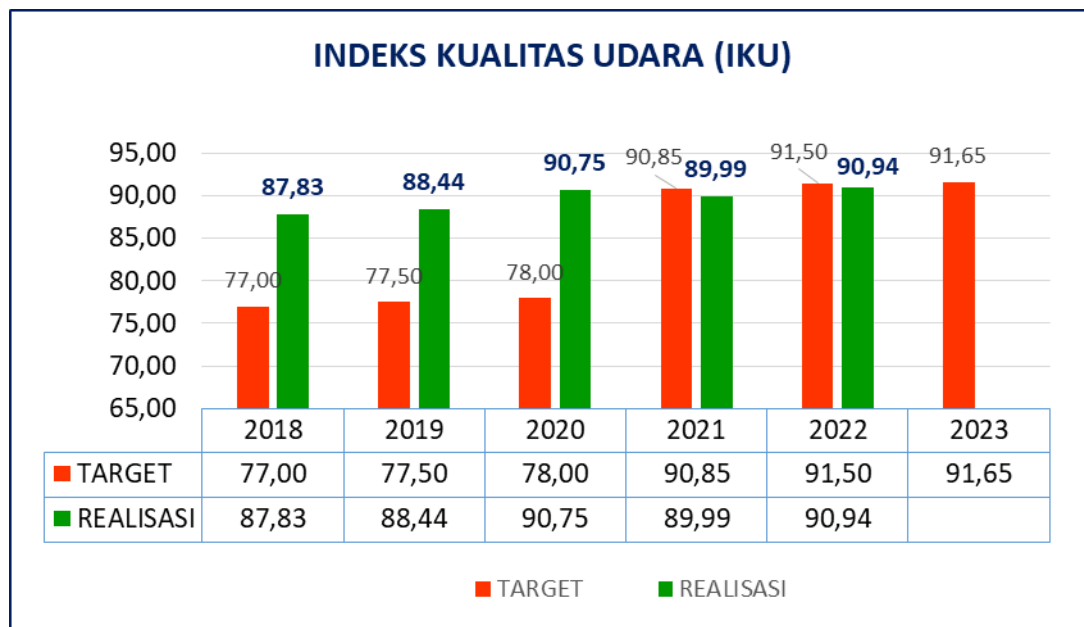
IPU = Indeks Pencemar Udara
IP_{NO₂} = Indeks Pencemar NO₂
IP_{SO₂} = Indeks Pencemar SO₂

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 6 Indeks Kualitas Udara tahun 2022

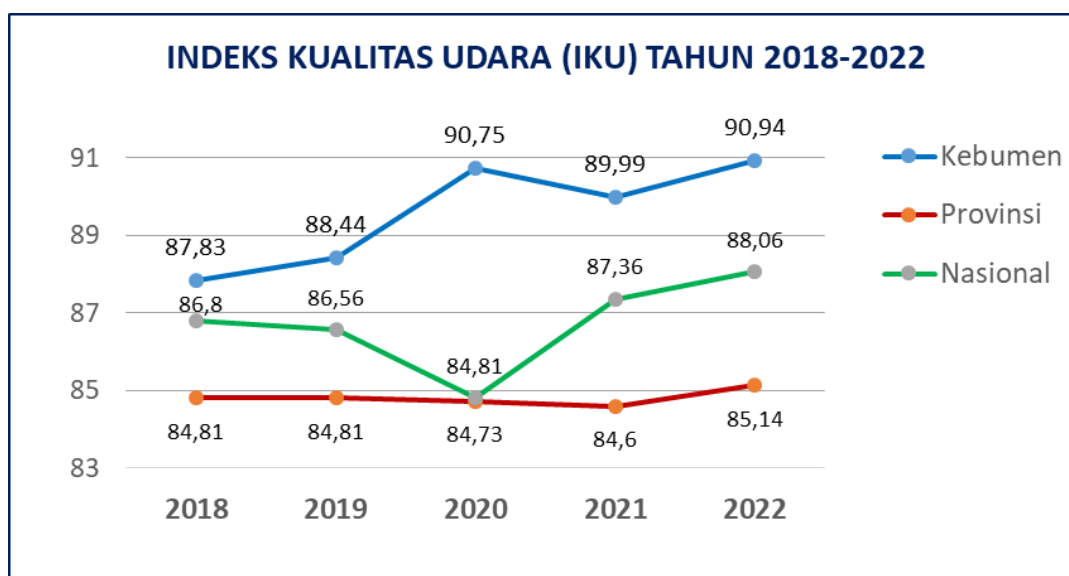
No	Indikator kinerja	Satuan	Capaian sd 2021	2022			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Udara	Point/ indeks	89,99	91,50	90,94	99,39	92,00

Angka indek tersebut menunjukkan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek negative bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang sensitive dan nilai estetika.



Grafik 3. 4 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen s/d Tahun 2022

Perbandingan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir dengan capaian diatas nasional maupun provinsi Jawa Tengah, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3. 5 Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional

Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung indikator ini yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.553.485.000,- dan realisasi Rp. 2.511.319.512,- (98,35%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,67 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

Indikator : Angka indeks kualitas air.

Indeks kualitas air sungai dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Fosfat*, *Total Coli dan Fecal Coli*. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform tidak dimasukkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang rutin diukur meliputi sungai lukulo dan wawar, di lokasi hulu dan hilir selama musim kemarau dan penghujan.

Keberadaan air terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Formulasi penghitungan angka Indeks Kualitas Air dengan formulasi sebagai berikut :

$$PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_R}{2}}$$

PIj = Pollutan Indeks peruntukan j

Ci =

Lij =

M = Nilai maksimum

R = Nilai minimum

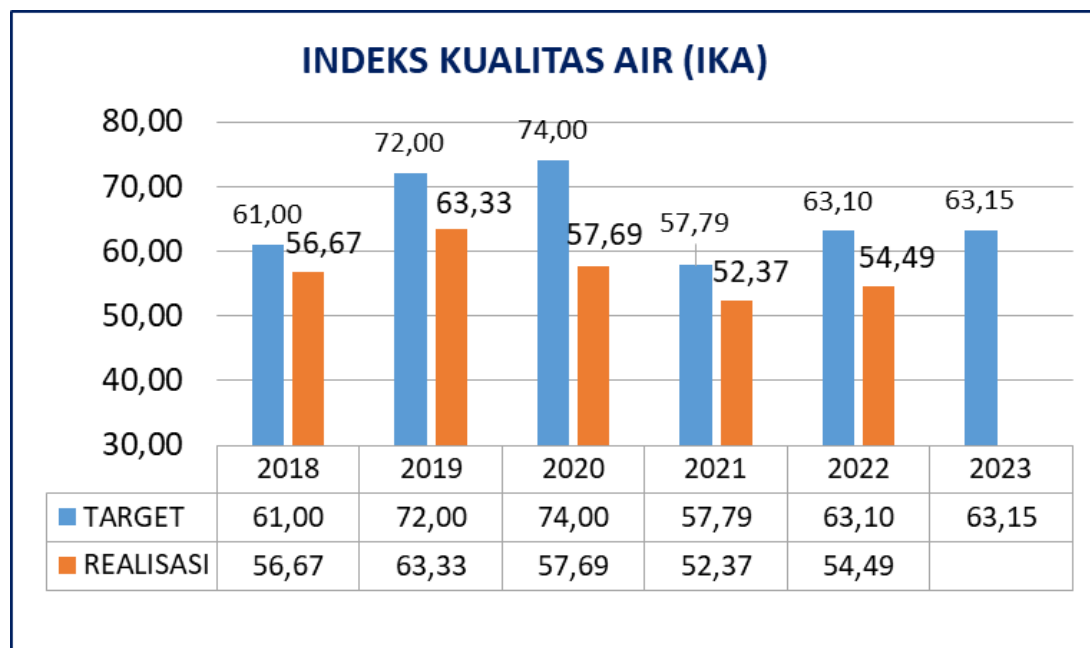
Nilai	Keterangan	Bobot Indeks
$0 \leq IP \leq 1,0$	Memenuhi baku mutu	70
$1,0 < IP \leq 5,0$	Tercemar ringan	50
$5,0 < IP \leq 10,0$	Tercemar sedang	30
$IP > 10,0$	Tercemar berat	10

Indeks kualitas air tahun Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

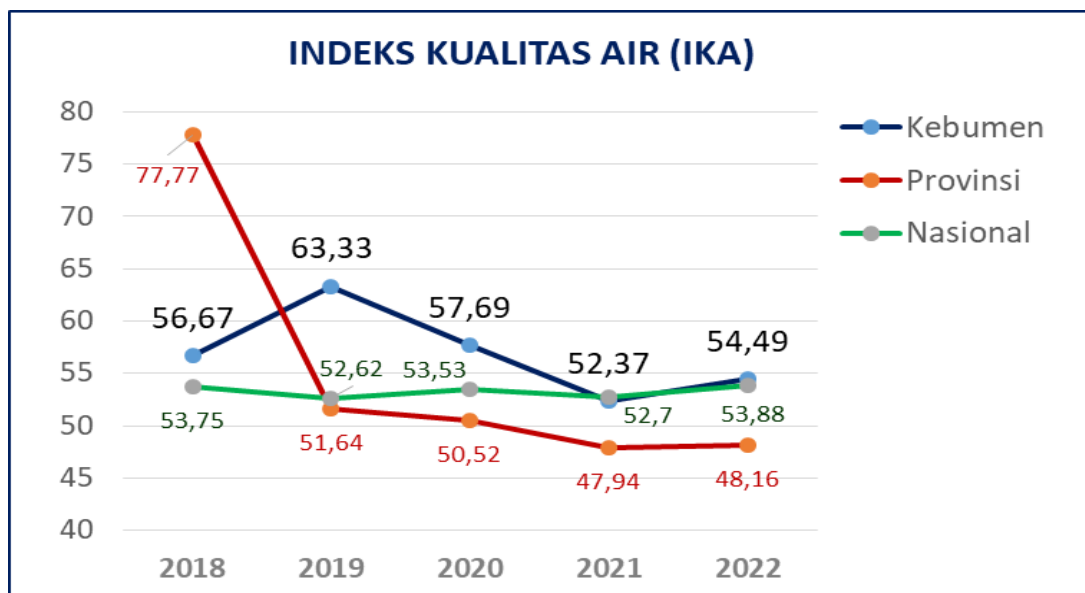
Tabel 3. 7 Capaian indeks kualitas air tahun 2022

No.	Indikator kinerja	Satuan	Capaian sd 2021	2022			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Air	Point/ indeks	57,37	63,10	54,49	86,35	63,37

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen diketahui bahwa beberapa parameter di atas baku mutu. Capaian indeks kualitas air Kabupaten Kebumen tahun 2016-2022 sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3. 6 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022



Grafik 3. 7 Capaian IKA Kabupaten Kebumen dibandingkan Provinsi dan Nasional

Capaian Indeks Kualitas Air tahun 2022 tidak sesuai dengan target, hal tersebut terutama disebabkan masih terjadi pencemaran air, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kualitas air sungai, diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestik, adanya budaya buang air besar sembarangan dan adanya pembuangan limbah industri kecil.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana instalasi pengolahan air limbah industri, pelayanan pengelolaan air limbah domestic (sedot tinja), dan sosialisasi serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung indikator ini yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.553.485.000,- dan realisasi Rp. 2.511.319.512,- (98,35%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,67 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

Indikator : Cakupan pelayanan sampah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi *pengurangan* dan *penanganan* sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Formulasi penghitungan cakupan pelayanan sampah yaitu :

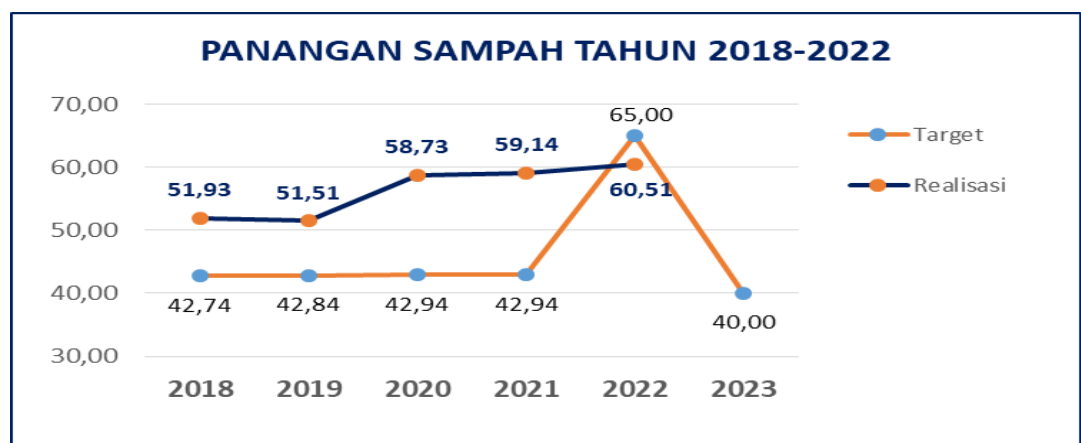
$$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100 \%$$

Capaian Cakupan Pelayanan Sampah tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 8 Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2022

No.	Indikator kinerja	Satu -an	capaian sd 2021	2022			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Pelayanan Sampah	%	59,14	65,00	60,51	93,09	42,94

Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2018-2022 sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3. 8 Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2018-2022

Tabel 3. 9 Perhitungan cakupan pelayanan sampah tahun 2022

No	Kecamatan	Jml Desa/kel	Timbulan Sampah dihasilkan (M3/hr)	Timbulan Sampah terangkut (m3.hr)	(%)
1	Ayah	18	139,06	-	
2	Buayan	20	140,99	-	
3	Puring	23	136,93	-	
4	Petanahan	21	129,63	-	
5	Klirong	24	137,80	-	
6	Buluspesantren	21	126,05	-	
7	Ambal	32	134,30	-	
8	Mirit	22	112,19	-	
9	Bonorowo	11	45,48	-	
10	Prembun	13	61,53	18,00	0,29
11	Padureso	9	35,75	-	
12	Kutowinangun	19	103,07	36,00	0,35
13	Alian	16	143,74	-	
14	Poncowarno	11	39,41	-	
15	Kebumen	24	284,96	204,00	0,72
16	Pejagoan	13	121,27	25,20	0,54
17	Sruweng	21	131,95	-	
18	Adimulyo	23	80,32	-	
19	Kuwarasan	22	108,92	-	
20	Rowokele	11	109,66	-	
21	Sempor	16	148,06	-	
22	Gombang	12	109,87	84,00	0,76
23	Karanganyar	7	82,78	54,00	0,65
24	Karanggayam	19	126,53	-	
25	Sadang	7	48,77	-	
26	Karangsambung	14	101,87	-	
	Kota Terlayani	88	763,47	462,00	60,51%

Dari data tersebut di atas, bahwa capaian kinerja cakupan pelayanan sampah belum dapat tercapai sesuai dengan target, oleh sebab itu untuk mengupayakan pencapaian target sangat diperlukan adanya penambahan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama penambahan armada angkutan sampah, penambahan TPS dan peningkatan fasilitas TPA Kaligending dan TPA Semali.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja cakupan pelayanan sampah antara lain :

- Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan;
- Penambahan area pelayanan sampah akan menambah *variable* biaya operasional, penambahan tenaga kerja pelayanan dan tenaga penarik retribusi, meningkatnya *variable* produksi sampah di area baru dan menurunkan umur penggunaan TPA
- Perlu peraturan (Perbup/Perda) untuk dasar penghitungan cakupan pelayanan sampah di Kabupaten Kebumen (sinkronisasi terhadap regulasi dari tingkat pusat/kementerian).
- Belum tercapainya target pengurangan sampah seperti kegiatan Bank Sampah, TPS3R dan pengelolaannya yang sulit sehingga sangat tergantung oleh pengangkutan ke TPA
- Anggaran perawatan sarpras dan penambahan sarpras yang belum mencukupi kebutuhan

Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemberdayaan bank sampah di tingkat desa/kelurahan, mengoptimalkan fungsi bank sampah dan TPS3R, serta pengolahan sampah rumah tangga).

Program untuk mendukung indikator ini yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan anggaran Rp. 9.079.790.000,- dan realisasi Rp. 8.813.383.708,- (97,07 %). Dalam hal ini terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 2,93% , berasal dari efisiensi belanja barang/jasa.

3.1.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan”.

Indikator sasaran : Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan

Rumus :

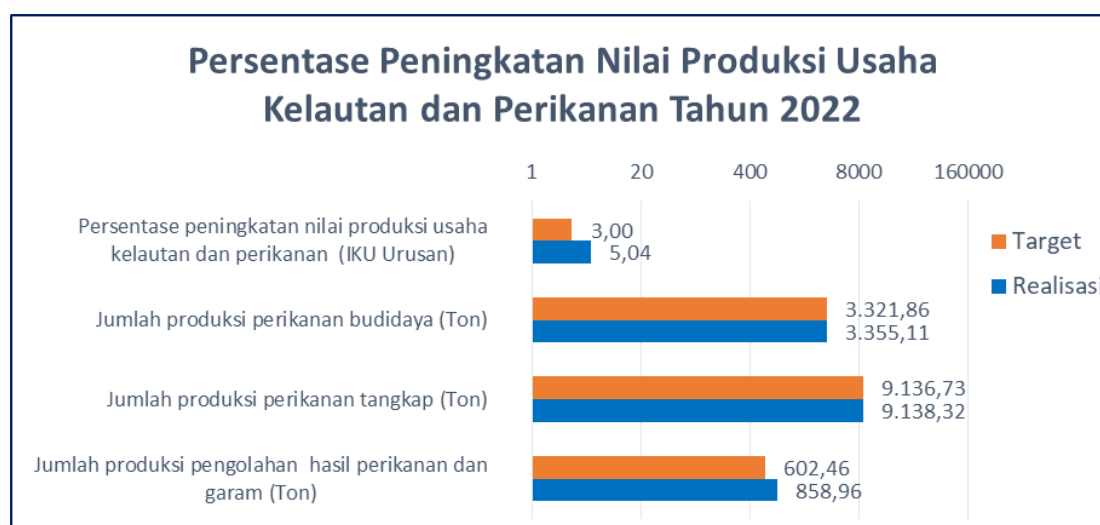
$$\text{Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan} = \frac{(\text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun } (n) \text{ dalam rupiah} - \text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun 2020 dalam rupiah})}{\text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun 2020 dalam rupiah}} \times 100\%$$

Data Kinerja Sasaran Strategis Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen Tahun 2022 secara umum dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. 10 Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU Urusan)	3,00	5,04	167,96
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	3.321,86	3.355,11	101,00
3.	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	9.136,73	9.138,32	100,02
4.	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Ton)	602,46	858,96	142,58

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

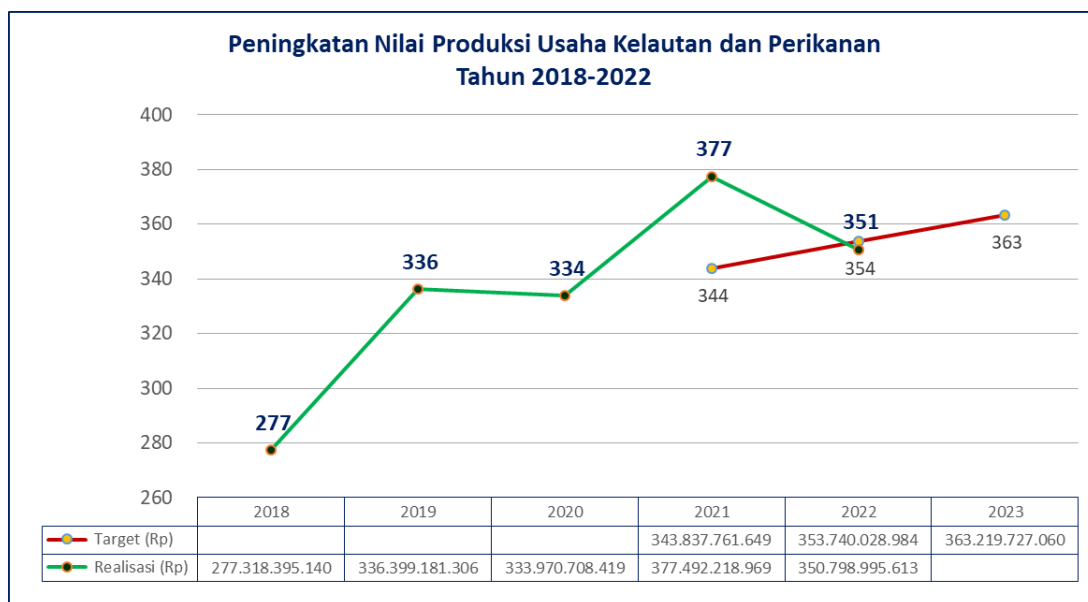


Grafik 3. 9 Target dan Realisasi Kinerja urusan Kelautan Perikanan Tahun 2022.

Tabel 3. 11 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Perikanan Tangkap (Rp)	Perikanan Budidaya (Rp)	Pengolahan Hasil Perikanan (Rp)	Garam (Rp)	Nilai Produksi Reali (Rp)	Target (%)	Capaian (%)	Ket.
1	2018	110.051.417.462	157.296.566.678	9.912.603.500	57.807.500	277.318.395.140	60,14	0	Data dasar menggunakan Th. 2015
2	2019	208.409.454.306	117.603.172.000	10.141.695.000	244.860.000	336.399.181.306	94,26	0	Data dasar menggunakan Th. 2015
3	2020	196.258.500.419	130.669.387.000	6.464.341.000	578.480.000	333.970.708.419	92,85	0	Data dasar Resntra 2021-2026
4	2021	212.457.910.669	135.191.978.000	29.218.550.300	623780000	377.492.218.969	13,03	2,50	521,26 Data dasar menggunakan Th. 2020
5	2022	173.982.608.774	138.501.573.000	37.715.056.339	599757500	350.798.995.613	5,04	3,00	167,96 Data dasar menggunakan Th. 2020

Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada grafik dibawah ini ;



Grafik 3. 10 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan tahun 2018 – 2022.

Dari tabel grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan baru mulai ditargetkan sejak tahun 2021 atau mulai sejak periode Renstra Tahun 2021-2026, sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 belum ditargetkan, namun demikian sudah dapat diketahui nilai produksi usaha kelautan dan perikanan dengan realisasi secara

berturut-turut, mulai dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 277.318.395.140,- tahun 2019 sebesar Rp. 336.399.181.306 , - tahun 2020 sebesar Rp. 333.970.708.419,- Selanjutnya Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 mulai ditargetkan sebesar 2,50% dan realisasi sebesar 12,73% sehingga capaiannya sebesar 509,09% atau termasuk kategori “Baik Sekali”.

Pada tahun 2022 target sebesar 3,00% dengan realisasi sebesar 5,04% sehingga capaiannya sebesar 167,94% dan termasuk kategori “Baik Sekali”. Adapun realisasi nilai produksi usaha kelautan dan perikanan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 350.798.995.613,-. jika dibandingkan dari tahun 2020 yaitu Rp. 333.970.708.419,-. Terdapat peningkatan sebesar Rp. 16.828.287.194,- atau sebanyak 5,04%.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap akhir target Renstra.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			T.Akhir Renstra 2026	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	12,73	3,00	5,04	167,96	9,00	56,00
Persentase Capaian Sasaran Strategis						56,00%	Kurang	

Secara rinci capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan yang ke-2 (dua) yaitu “Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan” dengan indikator sasaran “Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan” memiliki 4 (empat) indikator kinerja pendukung, yaitu :

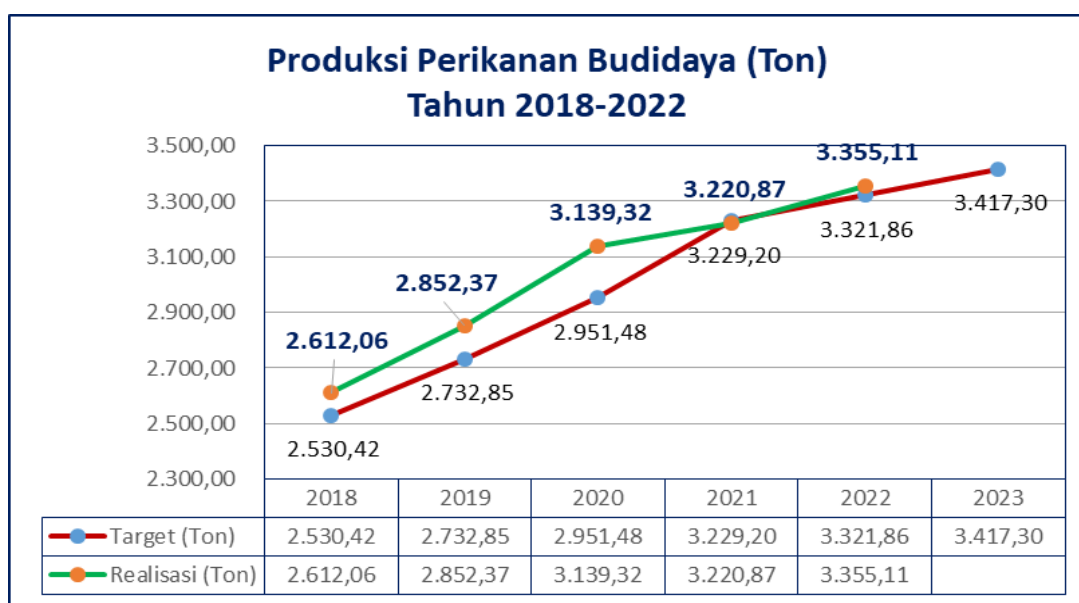
- a. Jumlah produksi perikanan budidaya mendapatkan angka capaian kinerja sasaran 101,00% dengan predikat **Sangat Baik**.

Indikator : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Pada Akhir Target Renstra.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			T.Akhir Renstra 2026	% Capaian trhdp Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	3.220,87	3.321,86	3.355,11	101,00	3.721,17	90,16
Persentase Capaian kinerja indikator pendukung IKU						90,16%	Baik	

Adapun target dan realisasi jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ;



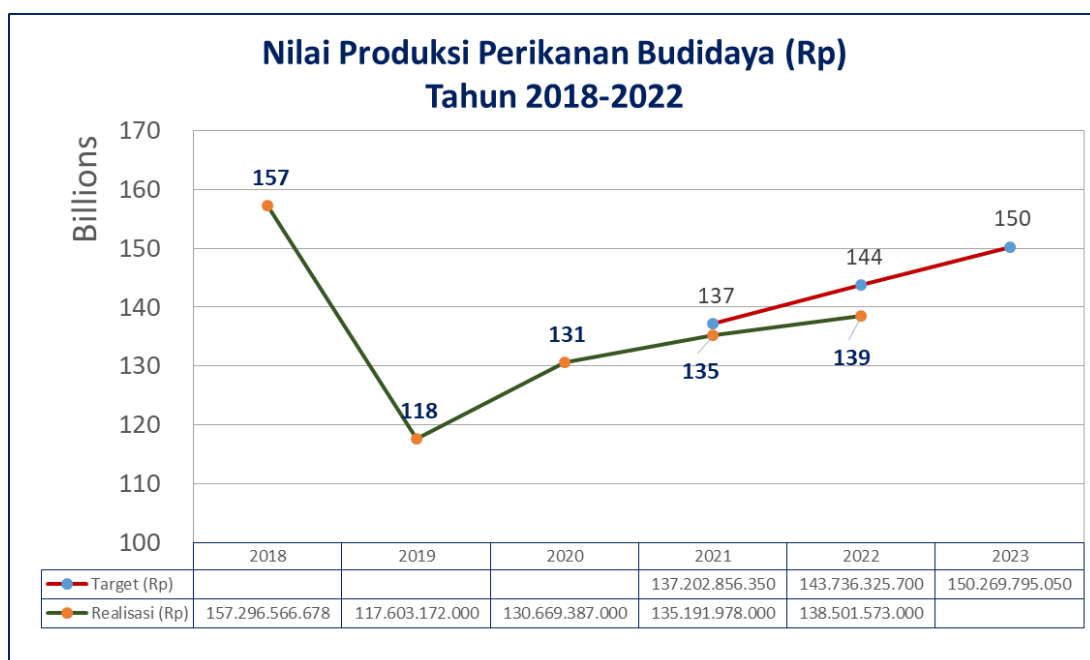
Grafik 3. 11 Target dan Realisasi produksi perikanan Budidaya tahun 2018 – 2022

Angka dasar target tahun 2020 sebesar 3.139,32 ton, pada tahun 2021 target peningkatan produksi ikan budidaya sebesar 89,88 ton. Sedangkan realisasi jumlah produksi ikan budidaya sebesar 3.220,87. Dengan demikian realisasi peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 81,56 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 90,74%.

Kemudian pada tahun 2022 target peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 92,66 ton. Sedangkan capaian pada

tahun 2022 sebesar 3.355,11 ton. Jika dikurangkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 3.220,87 memperoleh peningkatan sebesar 134,24 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 144,87%.

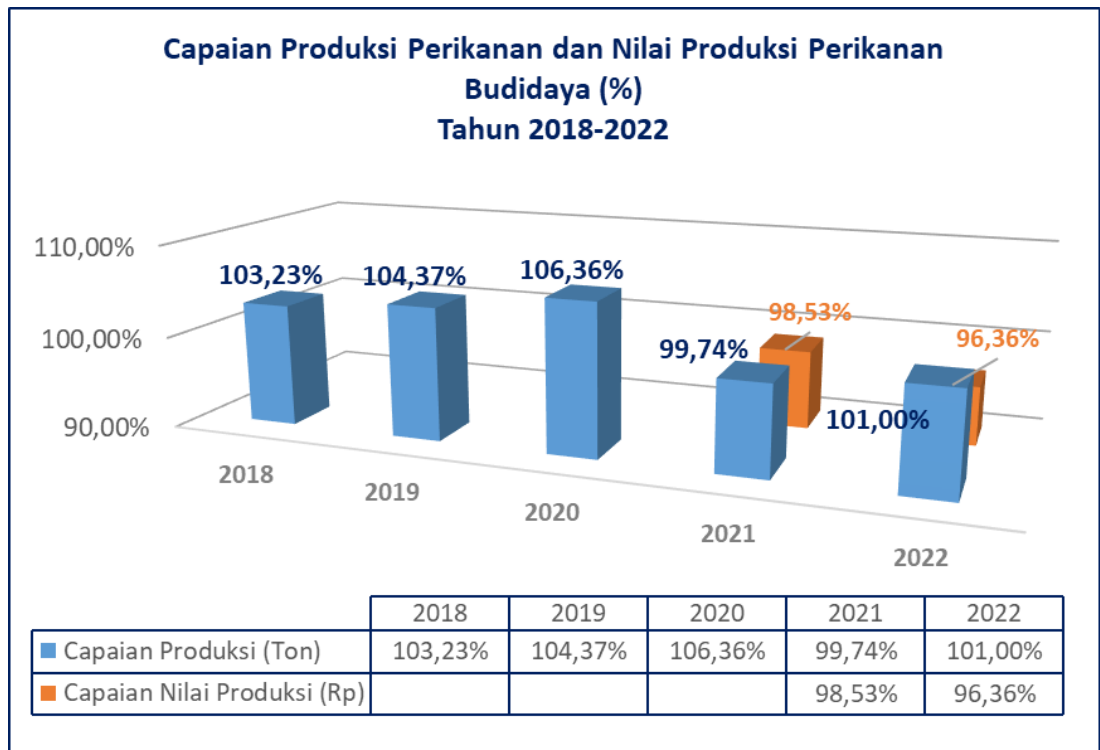
Realisasi peningkatan Nilai produksi perikanan budidaya (dalam rupiah) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Grafik 3. 12 Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Budidaya tahun 2018 – 2022

Pada tahun 2022 target nilai produksi perikanan budidaya dalam rupiah sebesar 10% pada indikator Program Pengelolaan Budidaya Perikanan dan setara dengan Rp. 143.736.325,-. Sedangkan realisasi nilai produksi perikanan budidaya tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 138.501.573.000,-. Sehingga capaian nilai produksi perikanan budidaya adalah sebesar 96,36 %.

Pada tahun 2022 target sebesar 3.231,98 ton, dengan realisasi sebesar 3.355,11 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 101,00 %.



Grafik 3. 13 Capaian Kinerja Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022

Sasaran kinerja tersebut dicapai melalui 5 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 3.649.413.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.381.670.036,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 267.742.964,- (7,33%).
2. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat dengan anggaran Rp. 430.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 428.862.300,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.137.700,- (0,26%).
3. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat dengan anggaran Rp. 481.854.000,- dan realisasi anggaran Rp. 461.030.300,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.20.823.700,- (4,32%).
4. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 50.000.000,-

dan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.569.800,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.430.200,- (2,86%).

5. Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp.31.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27452900,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.3.547.100,- (11,44%).

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja adalah :

1. Adanya upaya-upaya peningkatan produksi dalam program kegiatan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN yang berupa bantuan sarpras untuk budidaya yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok/masyarakat (paket kolam bundar, benih dan induk ikan).
2. Pelatihan teknik budidaya bagi pokdakan secara periodik diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan.
3. Adanya monitoring dan evaluasi bantuan kepada masyarakat.

Kinerja dapat dicapai sebesar 103,81% namun masih ada kendala antara lain :

Pembudidaya kebanyakan masih menggunakan system tradisional karena keterbatasan modal.

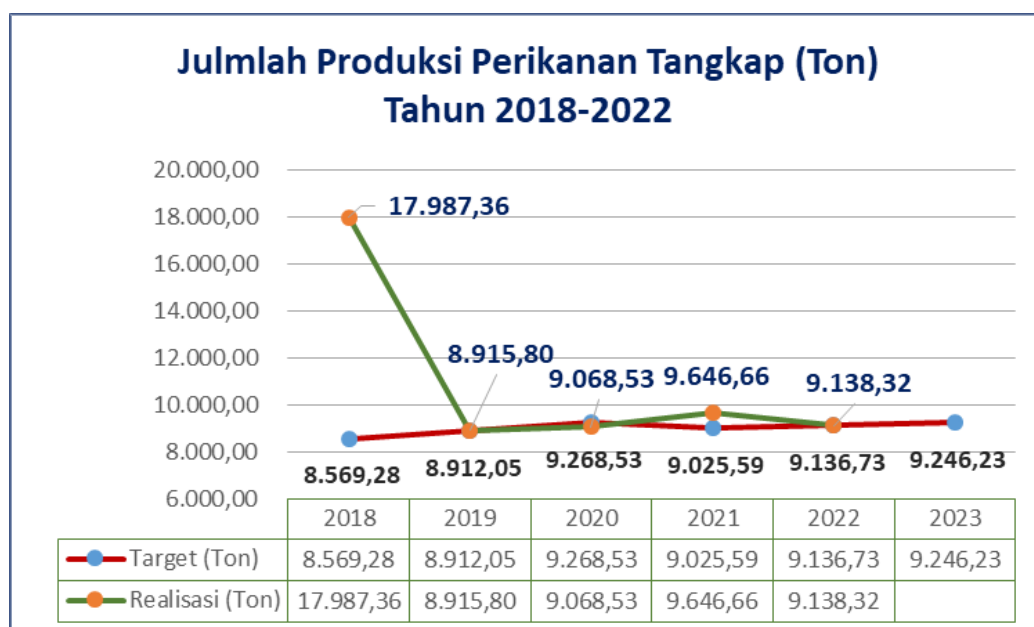
Strategi Pemecahan masalah dengan melakukan sosialisasi secara berkala tentang cara budidaya ikan dengan system modern, serta bimbingan teknis terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pembudidaya ikan.

- b. Capaian kinerja jumlah produksi perikanan tangkap mendapatkan angka capaian kinerja sasaran 100,02% dengan predikat Sangat Baik.

Indikator : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Terhadap Akhir target Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			T.Akhir Renstra 2026	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	9.646,66	9.136,73	9.138,32	100,02	9.595,01	95,24
Persentase Capaian kinerja indikator pendukung IKU						95,24%	Baik	



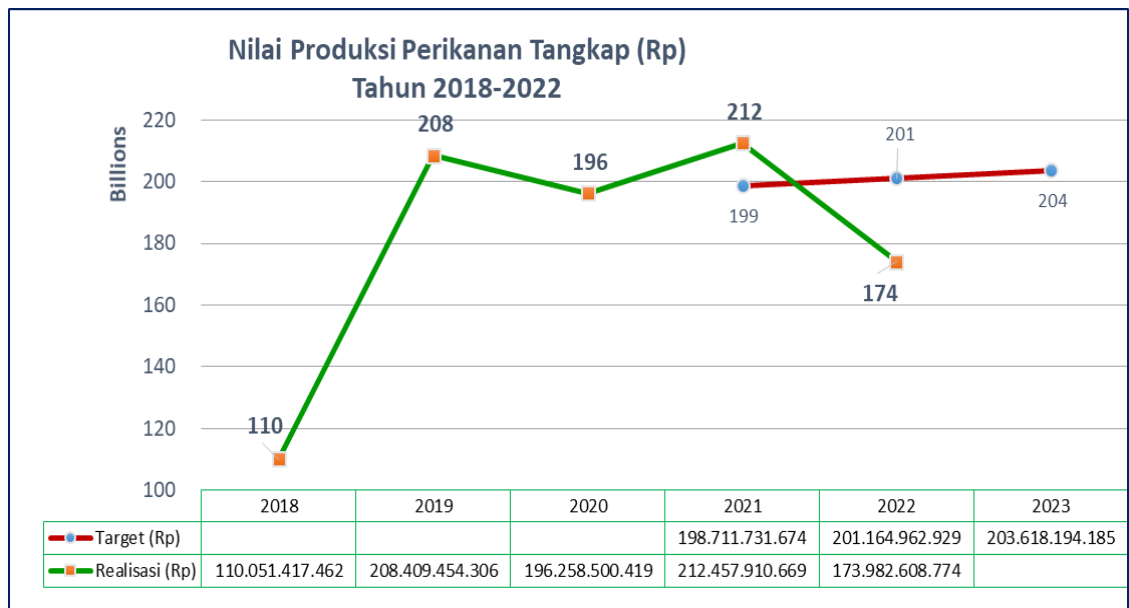
Grafik 3. 14 Target dan Realisasi produksi perikanan Tangkap tahun 2018 – 2022

Angka dasar tahun 2020 sebesar 9.068,53 ton, pada tahun 2021 target produksi tangkapan ikan sebesar 9.025,59 ton. Sedangkan realisasi tangkapan ikan sebesar 9.646,66 ton. Dengan demikian realisasi peningkatan produksi tangkapan ikan tahun 2021 sebesar 621,07 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 106,88%.

Pada tahun 2022 target kinerja sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 9.136,73 ton, dengan realisasi

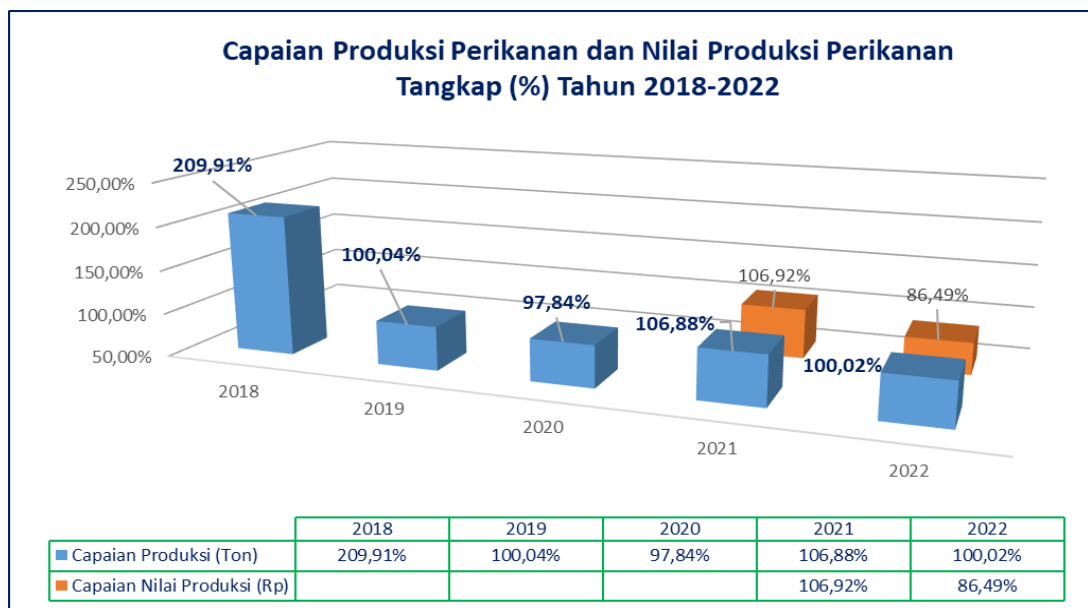
sebesar 9.138,32 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 100,02% dengan predikat “Sangat Baik “.

Realisasi peningkatan nilai produksi perikanan tangkap (Rp) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Grafik 3. 15 Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Tangkap tahun 2018 – 2022

Adapun capaian kinerja terkait Jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini ;



Grafik 3. 16 Capaian Kinerja Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2022

Dari grafik diatas terlihat capaian target nilai produksi perikanan tangkap selalu tercapai diatas 100 % kecuali pada tahun 2020 karena terjadi pembatasan kegiatan oleh pemerintah akibat adanya Covid-19. Sedangkan untuk nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 belum sesuai dengan target dan tidak mencapai 100% atau hanya tercapai sebesar 86,49%. Hal tersebut dikarenakan nilai produksi perikanan tangkap sangat tergantung dengan jenis dan harga tangkapan ikan yang diperoleh, sehingga meskipun jumlah produksi perikanannya meningkat belum tentu nilai produksinya juga/ikut meningkat.

Sasaran kinerja tersebut dicapai melalui 6 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dengan anggaran Rp. 2.662.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.825.372.840,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 837.127.160,- (31,44%).
2. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dengan anggaran Rp. 472.990.000,- dan realisasi anggaran Rp. 439.739.320,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 33.250.680,- (7,03%).

3. Pengembangan kapasitas nelayan kecil dengan anggaran Rp.250.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 247.033.050,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.966.950,- (1,19%).
4. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil dengan anggaran Rp. 519.478.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 516.917.350,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.560.650,- (0,49%).
5. Pelayanan penyelenggaraan TPI dengan anggaran Rp. 1.014.062.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 990.681.338,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.23.380.662,- (2,31%).
6. Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT dengan anggaran Rp. 51.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.240.700,-, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 759.300,- (1,49%).

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja adalah :

1. Produksi hasil tangkapan ikan yang melimpah
2. Harga jual hasil tangkapan ikan stabil dan cenderung naik
3. Faktor alam yang mendukung untuk aktivitas penangkapan ikan

Kinerja dapat dicapai sebesar 100,02% namun masih terdapat kendala antara lain :

1. Produksi melimpah, tetapi tidak semuanya terserap pasar serta banyak jenis tangkapan ikan bernilai ekonomis rendah, antara lain ubur-ubur, sehingga berpengaruh terhadap capaian nilai produksi.
2. Penanganan hasil tangkapan oleh nelayan kurang baik, sehingga menurunkan nilai jual hasil tangkapan.

3. Jumlah produksi perikanan, khususnya perikanan tangkap di laut (yang dilakukan oleh para nelayan) sangat tergantung sekali dari faktor alam/musim. Sebagaimana kita ketahui bersama di tahun 2022 ini sering terjadi adanya gelombang pasang yang sering terjadi, menjadi penyebab terbatasnya trip penangkapan nelayan, akibatnya hasil tangkapan belum maksimal.

Strategi Pemecahan masalah antara lain :

1. Pemberian fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang sesuai standar.
2. Memberikan sosialisasi cara penanganan hasil tangkapan yang baik

- c. Jumlah Produksi hasil pengolahan perikanan dan garam mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 142,58 % dengan predikat **“Sangat Baik”**.

Indikator : Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam.

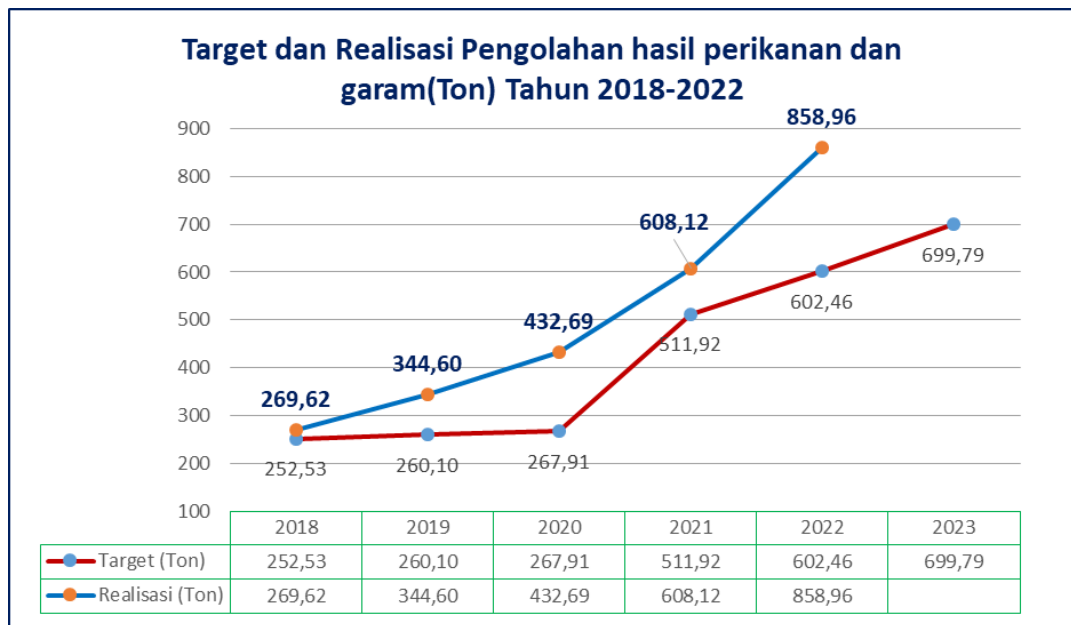
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan dan Garam terhadap akhir target Renstra.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Th 2021	Tahun 2022			T.Akhir Renstra 2026	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah produksi hasil pengolahan hasil perikanan dan garam	Ton	608,12	602,46	858,96	142,58	1.037,82	82,77
Persentase Capaian kinerja indikator pendukung IKU						82,77%	Baik	

Angka dasar tahun 2020 sebesar 432,69 ton. Pada tahun 2021 target produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 511,92 ton. Sedangkan realisasi produksi hasil pengolahan

perikanan dan garam sebesar 608,12 ton. Dengan demikian capaian produksi pengolahan hasil perikanan dan garam adalah sebesar 118,79%, dengan predikat **“Sangat Baik”**.

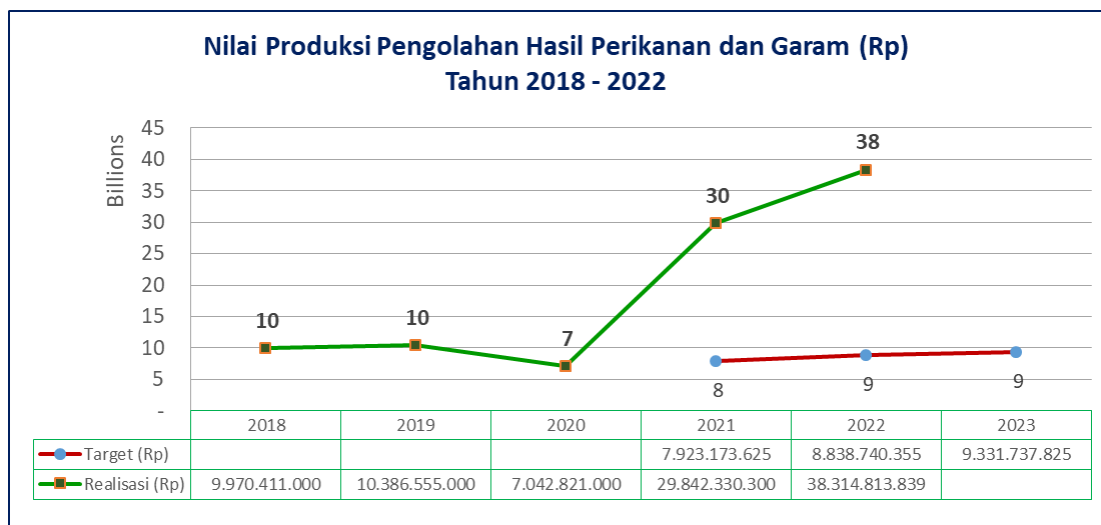
Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dan garam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini;



Grafik 3. 17 Target dan Realisasi produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Ton) tahun 2018 – 2022.

Pada tahun 2022 target produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 602,46 ton. Sedangkan realisasi produksi hasil pengolahan perikanan dan garam sebesar 858,96 ton. Dengan demikian capaian produksi pengolahan hasil perikanan dan garam adalah sebesar 142,58%, dengan predikat **“Sangat Baik”**.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Jumlah Nialai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebagai berikut :

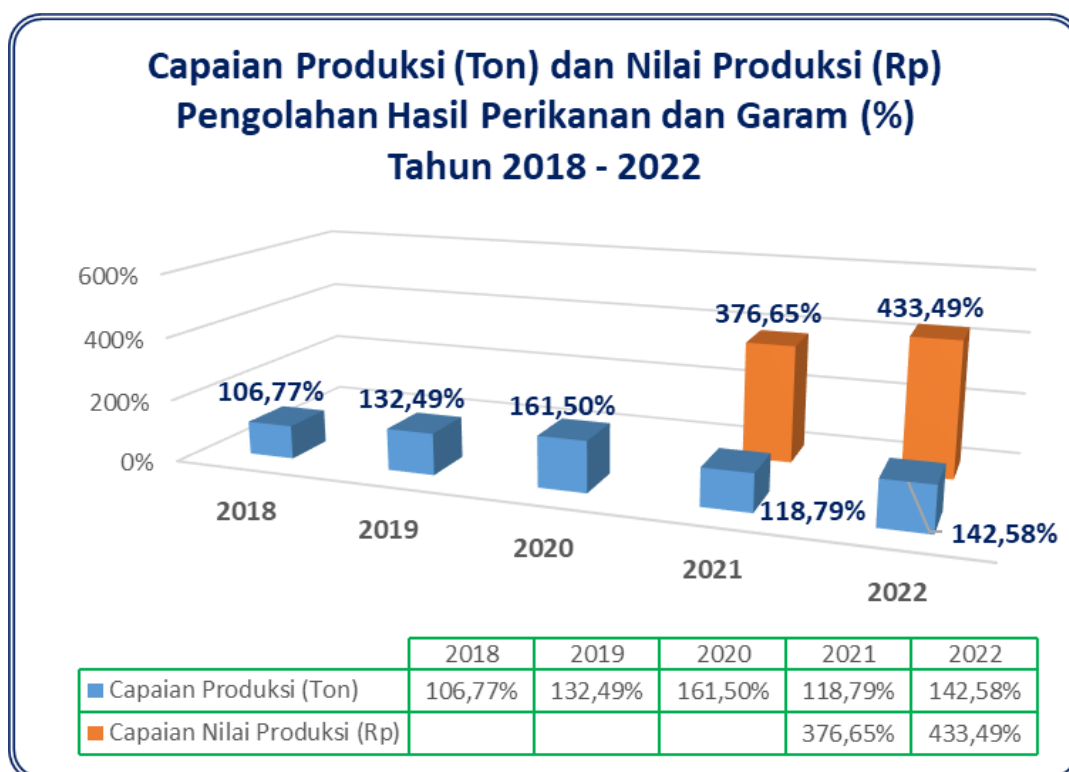


Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Nilai Produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Rp) tahun 2018 – 2022.

Pada Tahun 2020 Nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam memiliki capaian Rp. 7.042.821.000, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan perolehan nilai produksi sebesar Rp 29.842.330.300,- dengan peningkatan sangat tinggi sebesar Rp 22.799.509.300,- atau sekitar 323,73%. Pada tahun 2022 realisasi peningkatan nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam dalam rupiah sebesar Rp. 8.472.483.539,- dari tahun sebelumnya atau sekitar 28,39%.

Target Nilai Produksi pengolahan hasil perikanan dan garamn pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.838.740.355 dengan Realisasi Rp 38.314.813.839, sehingga capaian Nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 433,49%.

Realisasi produksi garam sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Grafik 3. 19 Capaian kinerja jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dan garam tahun 2018 -2022.

Untuk capaian kinerja pengolahan hasil perikanan dan garam pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami capaian yang sangat baik dengan hasil diatas yang diharapkan yaitu diatas 100%.

Adapun Indikator kinerja tersebut dicapai melalui 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.023.500,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 976.500 ,- (1,30%)
2. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 71.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.307.300,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.692.700,- (2,38%)

3. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 249.221.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 242.041.898 ,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.179.102 ,- (2,88%)

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja adalah :

1. Adanya program dari pemerintah baik APBD Kabupaten (Dana Insentif Daerah – DID) maupun APBD Propinsi (bantuan tunnel).
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM Kugar dengan adanya pelatihan dan studi banding.
3. Adanya dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait perkembangan usaha garam.
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan bagi Poklhasar.
5. Pemberian sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

Kinerja dapat dicapai sebesar 277,05% dan masih terdapat kendala antara lain :

1. Produktivitas yang masih rendah, karena belum semua kelompok Kugar aktif.
2. Masih tingginya ketergantungan usaha kelompok kepada bantuan pemerintah.
3. Belum adanya produk olahan ikan di Kabupaten Kebumen yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan.
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk hasil olahan ikan.

Strategi Pemecahan Masalah antara lain :

1. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan terhadap kelompok usaha garam, supaya produknya dapat bersaing di pasaran.
2. Menumbuhkan kemandirian kelompok usaha garam (Kugar)
3. Mendorong tumbuhnya Inovasi Produk Usaha Garam.

4. Menetapkan/mengangkat salah satu produk olahan ikan asli kebumen sebagai produk unggulan hasil olahan ikan khas kabupaten Kebumen.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan dengan terus melakukan pembinaan poklhasar serta menjamin ketersediaan bahan baku olahan.

3.2. Realisasi Anggaran

Dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 39.565.862.000,- Realisasi sebesar Rp. 37.571.148.652,- (94,96%). Anggaran tersebut untuk melaksanakan 14 program dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran berdasarkan program sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 16 Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2022

No.	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	13.157.200.000,-	12.919.353.430,-	98,19	100
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	341.000.000,-	329.154.234,-	96,53	100
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.553.485.000,-	2.511.319.512,-	98,35	100
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.720.050.000,-	3.525.858.300,-	94,78	100
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	110.000.000,-	106.092.775,-	96,45	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	179.210.000,-	171.814.144,-	95,87	100
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	199.940.000,-	186.171.940,-	93,11	100

No.	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	113.850.000,-	111.343.161,-	97,78	100
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	53.819.000,-	46.584.516,-	86,56	100
10	Program Pengelolaan Persampahan	9.079.790.000,-	8.813.383.708,-	97,06	100
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.970.030.000,-	4.093.365.260,-	82,36	100
12	Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.642.267.000,-	4.347.585.336	93,65	100
13	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	50.000.000,-	47.130.300,-	94,26	100
14	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	395.221.000,-	385.372.698,-	97,51	100
	JUMLAH	39.565.862.000,-	37.571.148.652,	94,96	100

Terdapat silpa sebesar Rp. 1.994.713.348 (5,04%) berasal dari penghematan belanja gaji PNS dan penghematan belanja barang/jasa serta sisa tender.

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa belum semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target, dimana 1 (satu) indikator dapat tercapai, sedangkan 1 (satu) indikator belum dapat tercapai sesuai dengan target. Nilai capaian indikator untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

a. Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 4. 1 Capaian Indikator Kinerja tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indesk Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) / IKU Daerah	74,10	68,17	92,00
2.	Indesk Kualitas Air (IKA)	63,10	54,49	86,35
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,50	90,94	99,39
4.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	60,83	49,53	81,42
5.	Capaian Luas RTH Perkotaan	17,19	17,18	99,94
6.	Cakupan Pelayanan Sampah	65,00	60,51	93,09

b. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU Urusan)	3,00%	5,04%	167,96
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	3.321,86	3.355,11	101,00
3.	Jumlah Produksi perikanan tangkap (Ton)	9.136,73	9.138,32	100,02
4.	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Ton)	602,46	858,96	142,58

4.2. Permasalahan/kendala.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

a. Urusan Lingkungan Hidup

- Untuk penambahan luasan ruang terbuka hijau (RTH) terkendala dengan sulitnya pengadaan lahan untuk pembangunan RTH di wilayah perkotaan.
- Masih terjadinya pencemaran lingkungan terutama pencemaran air dari limbah domestik.
- Bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang menyebabkan terjadinya penambahan timbulan sampah, serta belum optimalnya pembentukan dan kegiatan Bank Sampah/TPS3R.

b. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Masalah utama yang sering dihadapi baik pada perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dan juga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya adalah kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan, modal usaha terbatas, sarana dan prasarana budidaya /penangkapan/ pengolahan dan pemasaran ikan masih kurang serta khususnya untuk penangkapan di laut adanya cuaca yang kurang baik sehingga mengganggu operasional nelayan. Selain itu juga adanya kepadatan perahu dijalur penangkapan 1 (satu) yang berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan.
- Pada perikanan budidaya kurangnya bibit ikan dengan mutu yang terjamin serta harga pakan yang semakin tinggi sementara harga jual pada saat panen kurang terjaga stabilitasnya.

- Bidang pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang menjadi masalah besar adalah ketersediaan bahan baku dan jaringan pemasaran yang belum terbuka aksesnya, serta masih rendahnya angka konsumsi makan ikan ditingkat kabupaten apabila dibandingkan dengan tingkat propinsi maupun tingkat nasional.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja.

Dalam rangka peningkatan dan pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang, beberapa strategi dan kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

a. Urusan Lingkungan Hidup

1. Untuk Indikator IKLH nilai yang turun drastis adalah IKTL yang mana hasil pengukuran langsung dari provinsi, upaya untuk menaikkan IKTL adalah meningkatkan pengawasan hutan dan lahan kritis serta memperbanyak kegiatan Rehabilitasi dan Restorasi.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja Untuk pencapaian luasan RTH, diupayakan dengan merencanakan penambahan luasan sesuai dengan kondisi anggaran maupun meningkatkan kualitas serta pemeliharaan RTH yang sudah ada.
3. Untuk pencapaian target indeks kualitas air antara lain dengan memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana instalasi pengolahan air limbah industri, pelayanan pengelolaan air limbah domestic (sedot tinja), dan sosialisasi serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
4. Sedangkan untuk peningkatan cakupan pelayanan sampah, diupayakan melalui peningkatan pembentukan dan kegiatan bank sampah/TPS3R serta meningkatkan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat.

b. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2022 Kabupaten Kebumen mendapat program dari pemerintah pusat yaitu program pembangunan *shrimp estate*. Proyek ini berlokasi dikawasan pesisir kebumen yaitu di desa Jogosimo Kecamatan Klirong, Desa Tegalretno dan Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan. Harapan dengan dibangunnya proyek ini akan lebih meningkatkan produksi perikanan di kabupaten kebumen sekaligus mensejahterakan masyarakat kabupaten kebumen. Adapun langkah langkah yang akan di lakukan untuk meningkatkan kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di tahun mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pringtutul untuk mencukupi kebutuhan benih ikan lokal serta meningkatkan kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) yang sudah ada.
2. Pembinaan dan penyuluhan teknis perikanan, peningkatan kapasitas SDM di bidang budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan serta monitoring / evaluasi kegiatan.
3. Pembangunan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), diversifikasi alat tangkap serta fasilitasi dan bantuan modal untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar hasil Perikanan.
4. Peningkatan jumlah kelompok masyarakat pengawas dan fasilitasi sarana dan prasarana serta operasional guna

peningkatan pengawasan sumberdaya dan pelestarian sumberdaya hayati ikan dengan sosialisasi (Gema lestarian) serta pemasangan papan peringatan dan rambu-rambu peringatan.

5. Sosialisasi gerakan masyarakat makan ikan, lomba memasak berbagai bahan ikan serta mengusahakan ketersediaan ikan yang cukup dengan harga yang terjangkau untuk menjaga kestabilan produksi olahan.
6. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan terhadap kelompok usaha garam, dan mendorong inovasi produk usaha garam supaya produknya dapat bersaing di pasaran.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. ASEP NURDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 1993111001

LAMPIRAN 1 : REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	657.700.000	726.552.500	110,47	-10,47
2.	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran /Pengabuan Mayat	25.000.000	-	0,00	100,00
3.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	245.828.000	285.195.250	116,01	-16,01
4.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	220.000.000	169.320.000	76,96	23,04
5.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.900.000.000	893.216.161	47,01	52,99
6.	Hasil Penjualan Biota Perairan	100.000.000	58.200.000	58,20	41,80
	JUMLAH	3.148.528.000	2.132.483.911	67,73	32,27

II. BELANJA DAERAH

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
	TOTAL ANGGARAN DLHKP	39.565.862.000	37.571.148.652	94,96	5,04
	Urusan Penunjang	13.157.200.000	12.919.353.430	98,19	1,81
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.157.200.000	12.919.353.430	98,19	1,81
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.336.000	414.062.760	96,22	3,78
1.	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	275.908.000	266.044.812	96,43	3,57
2.	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.428.000	148.017.948	95,85	4,15
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.335.292.000	11.186.740.229	98,69	1,31
1.	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.744.129.000	10.598.276.704	98,64	1,36
2.	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	591.163.000	588.463.525	99,54	0,46
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.750.000	445.098.142	97,24	2,76
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.250.000	23.219.200	99,87	0,13
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	9.990.200	99,90	0,10
3	Penyediaan bahan logistik	98.500.000	96.989.100	98,47	1,53
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.750.000	41.749.610	100,00	0,00
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.500.000	14.496.800	99,98	0,02
6	Penyediaan bahan/material	72.500.000	72.477.500	99,97	0,03
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	177.250.000	176.718.732	99,70	0,30
8	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	20.000.000	9.457.000	47,29	52,72

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
IV.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.677.000	79.221.000	95,82	4,18
1.	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.677.000	69.505.000	95,64	4,36
2.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.716.000	97,16	2,84
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.672.000	348.982.057	94,15	5,85
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	6.750.000	6.487.505	96,11	3,89
2.	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	242.500.000	221.077.552	91,17	8,83
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	121.422.000	121.417.000	100,00	0,00
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.473.000	445.249.242	92,67	7,33
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	288.250.000	274.815.542	95,34	4,66
2.	Pemeliharaan mebel	7.500.000	7.472.000	99,63	0,37
3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.500.000	20.500.000	100,00	-
4.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	164.223.000	142.461.700	86,75	13,25
Urusan Lingkungan Hidup		16.351.144.000	15.801.722.290	96,64	3,36
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	341.000.000	329.154.234	96,53	3,47
I.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	341.000.000	329.154.234	96,53	3,47
1.	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	125.000.000	121.356.435	97,09	2,91
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	216.000.000	207.797.799	96,20	3,80
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.553.485.000	2.511.319.512	98,35	1,65
I.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	587.000.000	575.725.047	98,08	1,92
1.	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	142.000.000	139.433.454	98,19	1,81
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	45.000.000	43.892.500	97,54	2,46
3.	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	400.000.000	392.399.093	98,10	1,90
II.	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	647.517.000	638.847.861	98,66	1,34

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
1.	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	170.000.000	167.251.161	98,38	1,62
2.	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	477.517.000	471.596.700	98,76	1,24
III.	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.318.968.000	1.296.746.604	98,32	1,68
1.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1.172.968.000	1.155.174.800	98,48	1,52
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	146.000.000	141.571.804	96,97	3,03
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.720.050.000	3.525.858.300	94,78	5,22
I.	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.720.050.000	3.525.858.300	94,78	5,22
1.	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keaneekaragaman hayati	100.000.000	98.580.800	98,58	1,42
2.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.520.050.000	3.329.859.750	94,60	5,40
3.	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keaneekaragaman hayati	30.000.000	28.650.500	95,50	4,50
4.	Pengelolaan sarana dan prasarana keaneekaragaman hayati	70.000.000	68.767.250	98,24	1,76
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	110.000.000	106.092.775	96,45	3,55
I.	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	110.000.000	106.092.775	96,45	3,55
1.	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	60.000.000	57.027.125	95,05	4,95
2.	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	50.000.000	49.065.650	98,13	1,87
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	179.210.000	171.814.144	95,87	4,13
I.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	179.210.000	171.814.144	95,87	4,13
1.	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	115.600.000	110.618.919	95,69	4,31

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
2.	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	63.610.000	61.195.225	96,20	3,80
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199.940.000	186.171.940	93,11	6,89
I.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.940.000	186.171.940	93,11	6,89
1.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	126.300.000	119.430.800	94,56	5,44
2.	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	73.640.000	66.741.140	90,63	9,37
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	113.850.000	111.343.161	97,80	2,20
I.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.850.000	111.343.161	97,80	2,20
1.	Subkegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113.850.000	111.343.161	97,80	2,20
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.819.000	46.584.516	86,56	13,44
I.	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	53.819.000	46.584.516	86,56	13,44
1.	Subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30.000.000	26.472.165	88,24	11,76
2.	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengendalian atau melalui pengadilan	23.819.000	20.112.351	84,44	15,56
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.079.790.000	8.813.383.708	97,07	2,93
I.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	9.079.790.000	8.813.383.708	97,07	2,93
1.	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	22.500.000	22.202.924	98,68	1,32
2.	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	148.350.000	146.107.444	98,49	1,51
3.	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	6.998.226.000	6.922.558.981	98,92	1,08

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI KEUANGAN		SILPA
			(Rp)	(%)	(%)
4.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	207.250.000	202.444.379	97,68	2,32
5.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	1.703.464.000	1.520.069.980	89,23	10,77
Urusan Perikanan		10.057.518.000	8.850.072.932	87,99	12,01
K	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.970.030.000	4.069.984.598	81,89	18,11
I.	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.135.490.000	2.265.112.160	72,24	27,76
1.	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	2.662.500.000	1.825.372.840	68,56	31,44
2.	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	472.990.000	439.739.320	92,97	7,03
II.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	769.478.000	763.950.400	99,28	0,72
1.	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	250.000.000	247.033.050	98,81	1,19
2.	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	519.478.000	516.917.350	99,51	0,49
III.	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.014.062.000	990.681.338	97,69	2,31
1.	Subkegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.014.062.000	990.681.338	97,69	2,31
IV.	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.000.000	50.240.700	98,51	1,49
1.	Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	51.000.000	50.240.700	98,51	1,49
L	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.642.267.000	4.347.585.336	93,65	6,35
I.	Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	27.452.900	88,56	11,44
1.	Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	27.452.900	88,56	11,44
II.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.611.267.000	4.320.132.436	93,69	6,31
1.	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.649.413.000	3.381.670.036	92,66	7,34

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
2.	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaen/Kota	50.000.000	48.569.800	97,14	2,86
3.	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	430.000.000	428.862.300	99,74	0,26
4.	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	481.854.000	461.030.300	95,68	4,32
M	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000	47.130.300	94,26	5,74
I.	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000	47.130.300	94,26	5,74
1.	Subkegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	50.000.000	47.130.300	94,26	5,74
N	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	395.221.000	385.372.698	97,51	2,49
I.	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	75.000.000	74.023.500	98,70	1,30
1.	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	75.000.000	74.023.500	98,70	1,30
II.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	320.221.000	311.349.198	97,23	2,77
1.	Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.000.000	69.307.300	97,62	2,38
2.	Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	249.221.000	242.041.898	97,12	2,88
JUMLAH		39.565.862.000	37.571.148.652	94,96	5,04

**LAMPIRAN 2 : DATA PRESTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022**

**PENGHARGAAN SEBAGAI SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL**

1. MTsN 3 Kebumen, sebagai “Sekolah Adiwiyata Nasional 2022”
2. SD N 1 Karangduwu Kebumen, sebagai “Sekolah Adiwiyata Nasional 2022”
3. SD N 1 Kutosari Kebumen, sebagai “Sekolah Adiwiyata Nasional 2022”
4. SD N 1 Pejagoan Kebumen, sebagai “Sekolah Adiwiyata Nasional 2022”
5. SD N 4 Kutosari Kebumen, sebagai “Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
6. SD N 5 Panjer Kebumen, sebagai “Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022”
7. SDM N Alian, Kebumen, sebagai “Sekolah Adiwiyata Povinsi Jawa Tengah Tahun 2022”



Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/11/2022

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI**

Memberikan Penghargaan Kepada :

MTsN 3 KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2022

Berlaku sampai dengan November 2026



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

Jakarta, 24 November 2022
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaeva, M. Sc.



Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/11/2022

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI**

Memberikan Penghargaan Kepada :


SDN 1 KARANGDUWUR
KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2022

Berlaku sampai dengan November 2026.


MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

Jakarta, 24 November 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc



Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/11/2022

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI**

Memberikan Penghargaan Kepada :

SDN 1 KUTOSARI
KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2022

Berlaku sampai dengan November 2026...

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

Jakarta, 24 November 2022
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc



Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/11/2022

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI**

Memberikan Penghargaan Kepada :

**SDN 1 PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH**

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2022

Berlaku sampai dengan November 2026


MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

Jakarta, 24 November 2022
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA


Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0020871

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660-1/15 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Diberikan kepada :

SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KUTOSARI

Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen

Sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022



Semarang, 15 Desember 2022





GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002-5/0020871

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660-1/15 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Diberikan kepada :

SEKOLAH DASAR NEGERI 5 PANJER

Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen

Sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022



Semarang, 15 Desember 2022





GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5 / 0020871

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 6604/15 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Diberikan kepada :

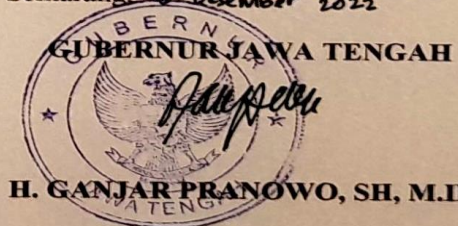
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ALIAN
Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen

Sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022



Semarang, 15 Desember 2022



LAMPIRAN 3 : PERJANJIAN KINERJA

(HALAMAN BERIKUTNYA)